

**PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
(Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar)**

Oleh :

**Dewi SPA<sup>1</sup> dan Fadjar Harimurti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail: [dewi.astutie@gmail.com](mailto:dewi.astutie@gmail.com), [fadjarharimurti@gmail.com](mailto:fadjarharimurti@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Objek penelitian ini adalah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yaitu di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) yang sekarang berganti nama menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD), dengan cara menyebarkan kuesioner ke bagian yang terkait, sehingga digunakan teknik pengambilan sampel *purposive random sampling* karena berdasar pertimbangan peneliti dalam memilih sampel. Kemudian dilakukan uji instrument, uji asumsi klasik dan menggunakan analisis regresi berganda Kesimpulan dari hasil pengujian setiap hipotesis menunjukkan bahwa (1) pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (2) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (3) pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian seluruh hipotesis yang diajukan diterima.

Kata kunci : pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan

**PENDAHULUAN**

Daerah memiliki peran dalam mengelola asset, dalam hal ini termasuk keuangan daerah, sehingga masing-masing daerah perlu mengelola keuangan yang dimilikinya. Untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya. Hal ini tercermin dalam kinerja pemerintah daerah, dengan demikian setiap kegiatan diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal, hal ini terjadi di semua

bidang baik sektor swasta maupun pemerintah. Didukung dengan diterapkannya pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah daerah harus dapat menunjukkan kinerja yang optimal. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. (Made Budi Sastra Wiguna, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, diantaranya adalah pengawasan internal. Pengawasan ini

bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas – tugas organisasi. (Almanda Primadona, 2013). Pengawasan intern meliputi suatu kegiatan pengawasan baik administrasi maupun pengelolaan keuangan oleh pihak intern perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Untuk dapat mewujudkan *Good Corporate Governance* maka pengawasan internal dalam instansi pemerintah dilakukan oleh BPKP, kemudian informasi hasil dari pengawasan selanjutnya disampaikan kepada Presiden (Dadang Kurnia, 2015)

Penelitian mengenai pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja ini sudah dilakukan oleh Made Budi Sastra Wiguna (2015), yang menunjukkan hasil yang signifikan antara pengawasan dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Almanda Primadona (2013) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa pengawasan internal berpengaruh dalam kepuasan kinerja pemerintahan kota Bandung.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja suatu Pemerintah Daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Almanda Primadona (2013) mengatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah daerah.. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai tersebut tidak hanya dapat memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi sistem tersebut juga dapat mendukung pada pencapaian kinerja. (Wawan dan Lia: 2009 dalam Rahmat Hidayat, 2015). Penelitian dari Rahmad Hidayat (2015) sendiri juga menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah juga berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah kota Padang.

Selain pengawasan internal dan sistem akuntansi keuangan Pemerintah

Daerah, terdapat faktor lain yang berpengaruh yaitu pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka akan dapat meningkatkan kinerja. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Puji Agus, 2015). Dalam hal ini juga sama dengan pengelolaan keuangan daerah. Rahmad Hidayat (2015) dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Made Budi Sastra Wiguna (2015) hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar. Dengan harapan akan semakin memperkuat dari hasil penelitian sejenis sebelumnya.

Penelitian serupa dilakukan oleh Almada Primadona (2013) dengan judul Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Penelitian dilakukan di Kota Bandung, hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah

berpengaruh terhadap kinerja. Made Budi Sastra Wiguna dkk(2015) , meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penelitian di Inspektorat Kabupaten Buleleng, hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi baik keseluruhan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Penelitian lain dilakukan oleh Rahmad Hidayad (2015), dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman) hasil penelitiannya dari ketiga variabel semuanya juga mendukung kinerja. Penelitian ini merupakan replikasi dari Risdhayanti Nur Sholikah (2016), dengan judul Pengaruh Pengawasan Interen, Pengawasan Sistem akuntansi keuangan daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di DPPKAD Kabupaten Boyolali, tetapi dalam penelitian ini menghubungkan ketiga variabel yaitu pengaruh pengawasan interen, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Dengan demikian perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah mengganti variabel kualitas laporan keuangan menjadi variabel kinerja, karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya akuntabilitas, transparansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan interen. Sehingga dalam penelitian ini mencoba menghubungkan variabel yang digunakan oleh Risdhayanti Nur Solikhah tetapi variabel pemahaman sistem akuntansi diganti dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sedangkan variabel dependen kualitas diganti menjadi kinerja. Obyek penelitian juga berbeda karena dilakukan di Kabupaten Karanganyar.

Berdasar uraian di atas maka judul penelitian ini adalah : **“Pengaruh Pengawasan Interen, Sistem akuntansi keuangan daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar)**

Permasalahan penelitian ini adalah apakah pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai

pengaruh pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah survey yang dilakukan di DPPKAD Kabupaten Karanganyar yang sekarang sudah berubah nama menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar. Dipilihnya obyek di BKD (DPPKAD) ini karena badan ini bertugas memonitor dan mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dari hasil skor kuesioner. Sedangkan sumber data adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BKD/DPPKAD Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 101 orang. Teknik pengampilan sampel menggunakan *purposive random sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasar pertimbangan peneliti. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti adalah bagian yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bagian Keuangan, yang membawahi bagian anggaran, bagian perbendaharaan kas, bagian akuntansi dan bagian pengelolaan asset.

### **Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan empat item kuesioner, yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengadopsi dari penelitian Rahmad Hidayat (2015) dan kuesioner pengawasan internal yang mengadopsi dari penelitian Risdhayanti Nur Sholikah (2016). Pengujian kualitas data instrumen penelitian dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan rumus Korelasi Pearson dan *Cronbach Alpha*.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala *Likert* 5 poin.

### **Teknik Analisis Data**

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan melalui empat uji yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

#### 2. Teknik analisis data

Pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah

X<sub>1</sub> = Pengawasan internal

X<sub>2</sub> = Sistem akuntansi keuangan daerah

X<sub>3</sub> = Pengelolaan keuangan daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi

e = *Error*

### 3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t. Kriteria pengujian: apabila  $p$  value  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya apabila  $p$  value  $\geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima berarti pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Uji F bertujuan untuk menguji ketepatan model regresi linier berganda dalam memprediksi pengaruh pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

5. Uji koefisien determinasi bertujuan mengetahui persentase pengaruh pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

## HASIL PENELITIAN

### Deskripsi Responden

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian keuangan yang membawahi beberapa bagian berikut:

- Bagian Anggaran berjumlah  
= 12
- Bagian Perbendaharaan kas  
berjumlah = 15
- Bagian Akuntansi berjumlah  
= 10
- Bagian Aset Daerah berjumlah  
= 12

Sehingga jumlah pegawai di bagian keuangan berjumlah 49 orang.

Dari keseluruhan bagian tersebut, semua transaksi bermuara di bagian akuntansi, dengan demikian kuesioner lebih banyak disarankan untuk diisi oleh bagian akuntansi. Adapun jumlah kuesioner yang dapat diolah berjumlah 37.

### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Hasil uji validitas item untuk variabel pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui uji Korelasi *Pearson* menunjukkan bahwa semua item pernyataan valid, ditunjukkan  $p$  value  $< 0,05$ .

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No. Item	<i>p value</i>				A	Kesimpulan
	X1	X2	X3	Y		
1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,05	Valid
2	0,001	0,028	0,000	0,000	0,05	Valid
3	0,000	0,006	0,000	0,000	0,05	Valid
4	0,007	0,003	0,000	0,000	0,05	Valid
5	0,013	0,011	0,000	0,003	0,05	Valid
6	0,000	0,010	0,000	0,005	0,05	Valid
7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,05	Valid
8	0,000	0,000	0,000	0,001	0,05	Valid
9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,05	Valid
10	0,000	0,000		0,000	0,05	Valid
11		0,000		0,000	0,05	Valid
12		0,000			0,05	Valid

Berdasarkan uji reliabilitas instrumen diperoleh hasil bahwa instrumen untuk variabel pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan reliabel karena masing-masing variabel menghasilkan *Cronbach Alpha* > 0,60.

Tabel 2: Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Kriteria uji	Kesimpulan
Pengawasan internal	0,856	0,60	Reliabel
Sistem akuntansi keuangan daerah	0,834	0,60	Reliabel
Pengelolaan keuangan daerah	0,842	0,60	Reliabel
Kinerja keuangan pemerintah daerah	0,910	0,60	Reliabel

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi linier berganda tidak terjadi masalah multikolinieritas, tidak

terjadi masalah heteroskedastisitas, tidak terjadi masalah autokorelasi, dan residual normal.

Tabel 3: Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinieritas	<i>Tolerance</i> (0,858; 0,912; 0,793) > 0,1 <i>VIF</i> (1,166; 1,096; 1,261) < 10	Tidak ada multikolinieritas
Uji Autokorelasi	<i>P value</i> (0,996) > 0,05	Tidak ada Autokorelasi
Uji Heteroskedastisitas	<i>P value</i> (0,558; 0,139; 0,885) > 0,05	Tidak ada Heteroskedastisitas
Uji Normalitas	<i>P value</i> (0,413) > 0,05	Residual normal

## Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 20 disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 5: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien regresi	Nilai t	Signifikansi
Konstanta	-13,024		
Pengawasan internal	0,437	2,306	0,028
Sistem akuntansi keuangan daerah	0,414	2,376	0,023
Pengelolaan keuangan daerah	0,529	2,091	0,044
F : 8,434			0,000
<i>Adjusted R<sup>2</sup> : 0,383</i>			

Variabel dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah

### Pengujian Hipotesis

1. Uji pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil uji pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 2,306 dengan *p value* (0,028) < 0,005 berarti pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 1 diterima.

2. Uji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil uji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 2,376 dengan *p value* (0,023) < 0,005 berarti sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian hipotesis 2 diterima.

3. Uji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil uji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 2,091 dengan *p value* (0,044) < 0,005 berarti pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.

### Uji F

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai F hitung sebesar 8,434 dengan *p value* (0,000) < 0,05 berarti model regresi linier berganda dinyatakan tepat (*fit*) dalam memprediksi pengaruh pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan



pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Uji Koefisien Determinasi**

Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,383 yang berarti pengaruh pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 38,3% sisanya sebesar 61,7% dijelaskan variabel lain, dengan demikian masih banyak variabel yang perlu diteliti lagi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 1 bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa pengawasan internal pada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar penting dilakukan untuk mencegah terjadinya beberapa penyimpangan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Semakin tinggi pengawasan internal maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten

Karanganyar akan semakin tinggi. Made Budi Sastra Wiguna (2015) hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Almanda Primadona (2013) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung, Dengan demikian penelitian ini konsisten dengan dua penelitian sebelumnya.

### **2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 2 bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dapat mendukung kegiatan operasional sehari-hari, sehingga diharapkan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat (2015) bahwa sistem

akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, temuan lain menunjukkan hubungan yang searah, karena semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka akan baik juga kinerja pemerintah daerah. Risdhayanti (2016) yang meneliti tentang sistem akuntansi, menghubungkan tingkat pemahaman sistem akuntansi dengan kualitas laporan keuangan, hasilnya menunjukkan ada pengaruh yang signifikan. Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan sistem akuntansi yang baik maka akan dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga berakibat pada kinerja yang baik juga. berkualitas.

### **3. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 3 bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan kontribusi positif pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Semakin baik

pengelolaan keuangan maka kinerja yang dihasilkan umumnya akan semakin baik pula. Hasil penelitian Almada (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hubungan yang searah dengan kinerja. Rahmad Hidayat (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan suatu hubungan yang searah, yang artinya semakin baik pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat. Dengan demikian penelitian ini konsisten dengan Almada (2013) dan Rahmad Hidayat (2015).

### **KESIMPULAN**

Hasil pengujian setiap hipotesis menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, berarti hipotesis 1 diterima. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, berarti hipotesis 2 diterima. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Karanganyar, berarti hipotesis 3 diterima.

Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas wilayah penelitian, dengan harapan hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi, dan dapat menghubungkan beberapa variabel lain yang terkait dengan Good Corporate Government atau tata kelola pemerintahan yang baik, karena dilihat dari persentasenya hasil penelitian ini menunjukkan dukungan variabelnya masih sangat rendah, sehingga masih ada beberapa variabel lain yang perlu ditambahkan dalam penelitian selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almanda Primadona. 2013. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kota Bandung)*. Skripsi Universitas Komputer Indonesia.
- Dadang Kurnia. 2015. *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Disampaikan pada Sosialisasi Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa*” Kemenko Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri. 2006. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Made Budi Sastra Wiguna,,Gede Adi Yuniartha, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2015. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No.1 Tahun 2015).
- Puji Agus. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. www.bpkp.depkeu.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 134 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI. 2008 No. 60. *Sistem Pengendalian Interen Pemerintah*.
- Rahmad Hidayat. 2015. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman)*. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Risdhayanti Nur Solikhah. 2016. *Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada DPPKAD Kabupaten Boyolali)*. Skripsi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.